

ABSTRAK

Dya Erlan Sekar Ati, NIM 12103183063, Penerapan Omnibus Law Ditinjau dari Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Fiqih Siyasah (Studi Kasus Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja), Jurusan Hukum Tata Negara, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2021, Pembimbing : Dr. Zulfatun Ni'mah, SH.I M.Hum

Kata kunci : Omnibus Law, Peraturan Perundang-Undangan

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya penerapan metode baru dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu omnibus law. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi 1) Bagaimana penerapan metode omnibus law dalam undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja? 2) Bagaimana penerapan metode omnibus law dalam undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja ditinjau dari asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan? 3) Bagaimana penerapan metode omnibus law dalam undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja ditinjau dari fiqh siyasah?.

Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Studi Kasus (*Study Case*) dan pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*), menggunakan metode pengumpulan data studi pustaka dengan teknik pengumpulan analisis bahan hukum teknik deskriptif dan teknik komparatif.

Pembahasan dalam skripsi ini menghasilkan kesimpulan *pertama*, metode omnibus law dalam undang-undang cipta kerja diterapkan dengan cara mengubah ketentuan-ketentuan dalam undang-undang sesuai klaster terkait perizinan berusaha, ketenagakerjaan, UMKM, kawasan ekonomi khusus, serta undang-undang lain. Perubahan tersebut digabungkan menjadi undang-undang baru melalui tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan. *Kedua*, ditinjau dari asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, penerapan metode omnibus law dalam pembentukan undang-undang cipta kerja terdapat ketidaksesuaian dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan khususnya asas dapat dilaksanakan, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, asas kejelasan rumusan dan asas keterbukaan, sehingga penerapan metode omnibus law dalam undang-undang cipta kerja tidak menaati teknik pembentukan peraturan-perundang-undangan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. *Ketiga* ditinjau dari fiqh siyasah, penerapan metode omnibus law dalam pembentukan undang-undang cipta kerja sudah sesuai mewujudkan unsur dalam fiqh siyasah dusturiyah. Dibuktikan pada proses pembentukannya mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan sampai dengan pengundangan, Presiden dan DPR sama-sama terlibat dalam musyawarah antar lembaga yang berwenang.

ABSTRACT

Dya Erlan Sekar Ati, NIM 12103183063, Application of Omnibus Law Reviewed from Legislation Making Principles and Fiqih Siyasah (Case Study of Law of Indonesia Number 11 of 2020 on Job Creation), Department of Constitutional Law, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2021, Mentor: Dr. Zulfatun Ni'mah, SH.I M.Hum

Keywords: Omnibus Law, Legislation

This research is based on the application of new methods in the legislation making, omnibus law. The formulation of problems in this study includes 1) How is the application of the omnibus law method in law number 11 of 2020 on job creation? 2) How is the application of the omnibus law method in law number 11 of 2020 on job creation reviewed from legislation making principles? 3) How is the application of the omnibus law method in law number 11 of 2020 on job creation reviewed from fiqh siyasah?

The research method used normative law research with statute approach, Case Study Approach and comparative approach, using literature study data collection method legal material analysis collection techniques with descriptive and comparative techniques.

The first conclusion, the omnibus law method in law number 11 of 2020 on job creation is applied by changing the provisions of the related law, about business licensing, employment, MSMEs, special economic zones. Then combine the new provisions in the new law through the following stages: planning, preparation, discussion, endorsement, promulgation. The second problem is reviewed from legislation making principles, the application of the omnibus law method in law number 11 of 2020 on job creation, there is it is not in accordance with legislation making principles specifically enforceability principle, efficiency and effectiveness principle, clear formulation principle and transparency principle. The application of the omnibus law method in law number 11 of 2020 on job creation is not in accordance with the technique of legislation making. The third problem is reviewed from fiqh siyasah, the application of the omnibus law method in law number 11 of 2020 on job creation is appropriate to realize the elements in fiqh siyasah dusturiyah. Proven during the formation process includes planning, preparation, discussion, endorsement, promulgation, President and DPR are both involved in discussion between the authorities.